

DAERAH PRIORITAS UNTUK PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI RAKYAT MISKIN DI INDONESIA²

Didiq Rosadi Ali

Statistika Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta Timur
Email: 09.5940@stis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengkaji gambaran kemiskinan Indonesia secara makro yang dikaitkan dengan dimensi pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut. Penelitian ini memfokuskan pandangannya pada hubungan kemiskinan dengan pendidikan. Lebih spesifik, penelitian ini akan menggambarkan kondisi pendidikan tinggi masyarakat miskin Indonesia yang ditinjau dalam level provinsi dengan menggunakan beberapa variabel atau indikator kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Persentase Penduduk yang Menamatkan Pendidikan Tinggi (SMA ke atas). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan *cluster analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 provinsi dengan kategori prioritas 1 yaitu perlu penanganan segera serta mendapatkan kebijakan yang tepat untuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi bagi rakyat miskin yaitu Propinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

Kata Kunci : pendidikan tinggi, *cluster analysis*, daerah prioritas

Abstract

This study was conducted to assess the macro picture of Indonesian poverty is associated with a dimension of education as a factor affecting the poverty. This eksperiment is focus on the relationship of poverty with education . More specifically , this study will describe the condition of the poor Indonesian higher education are reviewed in the provincial level by using some variables or indicators of poverty is Poverty Gap, Poverty Severity Index and Percentage of Population who finished his Higher Education (high school and above). This study uses descriptive analysis and cluster analysis. These results indicate that there are 3 provinces with priority categories 1 that need immediate attention and get the right policy for increasing access to higher education for the poor is Papua , West Papua and Maluku.

Keywords : higher education , cluster analysis , regional priority

² Paper ini telah dipresentasikan dalam acara Simposium Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa dengan tema "Pendidikan Berkeadilan" (Universitas Indonesia, 30 Oktober 2013)

Pendahuluan

Kemiskinan yang melanda Indonesia disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang saling terkait. Salah satunya adalah sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini, masih belum berpihak pada ekonomi kerakyatan yang mampu mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Sistem perekonomian Indonesia masih berfokus pada permasalahan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara cepat dengan memacu pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Upaya peningkatan PDB di Indonesia diterapkan pada sektor-sektor yang dapat memberikan nilai tambah tinggi seperti sektor industri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terbukti mampu meningkat sebesar enam persen pada tahun 2011, tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa contoh upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan berbagai upaya lainnya. Berdasarkan data BPS dari tahun 1996 sampai September 2012, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia memiliki tren yang menurun. Meskipun pada masa krisis ekonomi melonjak drastis. Hal ini mengindikasikan, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan cukup berdampak dalam membantu penduduk bawah terlepas dari jeratan kemiskinan. Namun, pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar delapan hingga sepuluh persen di tahun 2014 mengingat pada September 2012 persentase penduduk miskin masih berada di angka 11,66 persen.

Meski tren persentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia menurun dari tahun ke tahun, jika dikaji secara regional, persentase penduduk miskin di tiap-tiap Provinsi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di satu sisi, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada september 2012 menunjukkan angka terendah nasional yaitu sebesar 3,7 persen, namun di sisi lain Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 30,66 persen.

Berbicara mengenai kemiskinan, tentu tidak akan lepas dari dimensi pendidikan. Menurut World Bank, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Presiden RI, dalam bab 27 tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas (2011). Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi.

Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2004 – 2009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia maka perlu adanya sebuah sistem pendidikan nasional, dimana Negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian diharapkan warga Negara mendapatkan bekal untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun permasalahannya adalah, sistem pendidikan nasional utamanya akses pendidikan tinggi sebagai salah satu upaya untuk menjaring “ujung tombak” penggerak pembangunan ekonomi Negara belum optimal dilaksanakan. Menurut data BPS, pada tahun 2011 hanya sekitar 12,65% penduduk dengan kategori miskin yang menamatkan pendidikan jenjang SMA keatas. Artinya bahwa, kemiskinan memang sangat mempengaruhi akses seseorang terhadap pendidikan, utamanya pendidikan tinggi.

Kemudian bahwa, pemerintah dalam menentukan kebijakan nasional tentang sistem pendidikan nasional yaitu dalam hal ini pendidikan tinggi bagi rakyat miskin perlu memperhatikan keadaan di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Artinya bahwa, pemerintah perlu referensi, daerah/provinsi mana saja yang perlu dijadikan prioritas dalam peningkatan akses pendidikan tinggi bagi rakyat miskin terkait dengan prinsip keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pendidikan untuk semua, tidak mengenal golongan, tidak mengenal asal daerah serta status ekonomi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana gambaran akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi?
- b) Bagaimana pengelompokan provinsi-provinsi di Indonesia terkait dengan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a) Menggambarkan kondisi masyarakat miskin di Indonesia berdasarkan kriteria pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi yang telah ditamatkan yaitu SMA ke atas.
- b) Mengelompokkan provinsi-provinsi Indonesia berdasarkan kriteria prioritas dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi.

Tinjauan Pustaka

1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Wikipedia, 2004). Dalam mendefinisikan kemiskinan, dikenal dua istilah yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut merupakan keadaan dimana suatu orang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Kebutuhan dasar ini diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. *World Bank* (2008) menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara. Di negara-negara sedang berkembang seseorang

disebut miskin bila berpendapatan kurang dari \$ US 1 per hari. Sumodiningrat (2005) menyebutkan bahwa masyarakat miskin secara umum ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*).
- Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*).
- Ketidakmampuan menjangkau sumberdaya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*).
- Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan menentukan nasib dirinya sendiri serta
- senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis.
- Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Pengertian kemiskinan relatif menurut BPS (2008) adalah “suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”. Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

1.2 Hubungan Kemiskinan dan Pendidikan

Menurut Utama (2009), dengan pendidikan yang lebih baik maka orang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pandangannya pada hubungan kemiskinan dengan pendidikan. Lebih spesifik, penelitian ini akan menggambarkan kondisi pendidikan tinggi masyarakat miskin Indonesia yang ditinjau dalam level provinsi dengan menggunakan beberapa variabel atau indikator kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Persentase Penduduk yang Menamatkan Pendidikan Tinggi (SMA ke atas). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu "Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2011" dan . Digunakan tahun 2011 karena data Persentase Penduduk yang Menamatkan Pendidikan Tinggi (SMA ke atas) belum tersedia pada tahun 2011. Dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu:

1. Analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dengan bantuan grafik.
2. *Cluster Analysis*/ Analisis Gerombol yaitu mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia dalam beberapa kelompok yang menandakan tingkat prioritas peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin.

Metode hirarki dalam analisis cluster terdiri dari *avarage linkage*, *single linkage*, dan *complete linkage*. Pengklusteran dengan metode hirarki ditentukan dengan menggunakan jarak *euclidean*. Hasil dari ketiga metode hirarki ini kemudian akan dibandingkan dan dianalisis untuk memperoleh kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertentu.

- a) *Avarage Linkage*
Avarage Linkage merupakan metode pengklusteran dalam hierarki dengan menggunakan jarak rata-rata antara observasi yang diuji. Metode hierarki mengkategorikan ke-33 provinsi di Indonesia hingga menjadi satu kategori. Dalam penelitian ini diharapkan untuk membentuk 4 kategori.
- b) *Single Linkage*
Single Linkage merupakan metode pengklusteran dalam hierarki dengan menggunakan jarak terdekat antara observasi yang diuji. Metode hierarki mengkategorikan ke-33 provinsi di Indonesia hingga menjadi satu kategori.
- c) *Complete Linkage*
Complete Linkage merupakan metode pengklusteran dalam hierarki dengan menggunakan jarak terjauh antara observasi yang diuji. Metode hierarki mengkategorikan ke-33 provinsi di Indonesia hingga menjadi satu kategori.
- d) *K-Means Cluster*
Metode *K-means cluster* merupakan metode non hierarki yang melakukan pengklusteran dengan cara iterasi. Iterasi dilakukan hingga seluruh amatan dalam analisis tidak ada yang berpindah dari satu cluster ke cluster lainnya. Pada metode *k-means cluster* jumlah cluster yang dikehendaki ditentukan oleh peneliti.

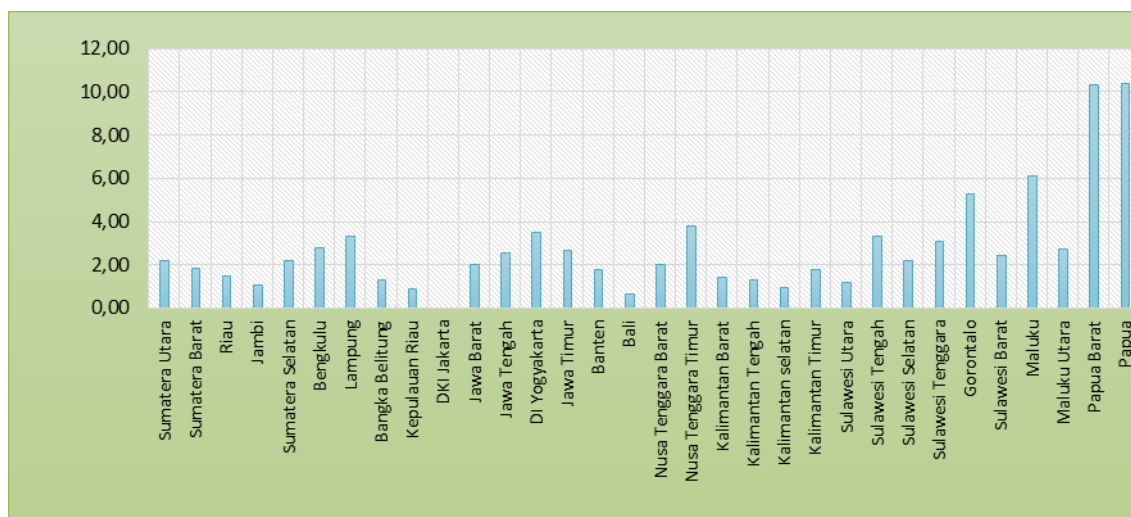
Pembahasan

1.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan di sini adalah garis kemiskinan absolut yaitu garis kemiskinan hasil penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan makanan.

Dari grafik pada Gambar 1, dapat terlihat bahwa provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah provinsi Papua dan Papua Barat. Angka indeks kedua provinsi tersebut bahkan melebihi 10. Artinya bahwa, rata-rata penghasilan penduduk di kedua provinsi tersebut sangatlah jauh garis kemiskinan. Angka indeks yang lebih dari 10 itu menandakan bahwa dibutuhkan 100 persen *cash transfer* dari garis kemiskinan untuk menghapus kemiskinan.

Sebagai ilustrasi, misalkan pada tahun 2010, jumlah penduduk provinsi Papua adalah 51,7 ribu jiwa, kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 10 dan GK Rp. 250.267,-. Ini berarti transfer uang yang diperlukan untuk menghapus kemiskinan adalah sebanyak Rp. 100 trilyun lebih ($1000 \text{ persen} \times \text{Rp. } 250.267,- \times 51.700 = \text{Rp. } 100.293.880.390$).



Gambar 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2011

Provinsi dengan kedalaman kemiskinan tertinggi berikutnya adalah provinsi Maluku yaitu nilainya lebih dari 6, disusul kemudian oleh provinsi Gorontalo sebagai provinsi baru yang memang belum terlalu berkembang. Sementara itu, provinsi dengan tingkat kedalaman kemiskinan terendah adalah provinsi DKI Jakarta yang nilainya mendekati 0. Walaupun pada faktanya masih banyak masyarakat kategori miskin yang ada di provinsi tersebut namun karena ukuran ini bernuansa rata-rata maka tertutupi oleh penerima pendapatan yang sangat besar di sisi lain.

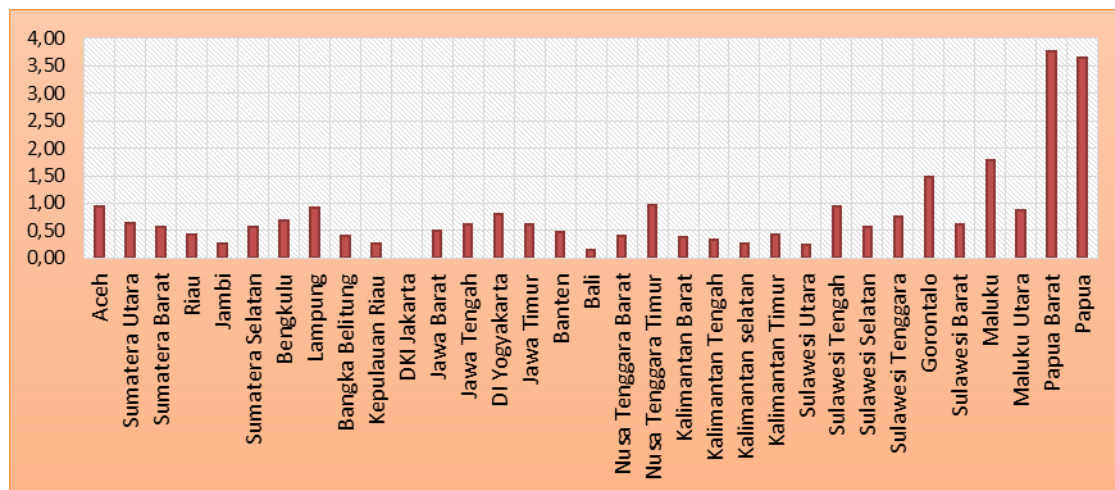
1.2 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

P2 adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan Gambar 2, sama seperti indeks sebelumnya, bahwa provinsi dengan nilai keparahan kemiskinan terbesar adalah provinsi Papua dan Papua Barat yang nilainya mencapai lebih dari 3,5.

Hal ini menandakan bahwa pada kedua provinsi tersebut selain rata-rata penghasilan penduduknya jauh dari garis kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga sangatlah besar.

Hasil yang sama didapatkan pula pada provinsi dengan keparahan kemiskinan tertinggi selanjutnya yaitu provinsi Maluku dan Gorontalo serta provinsi dengan keparahan kemiskinan terendah yaitu DKI Jakarta. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pengukuran ketimpangan pendapatan yang dilakukan perlu di cek kembali atau karena ini pengukurannya nasional maka, standar kehidupan di daerah DKI Jakarta akan sangat berbeda dengan 4 daerah dengan keparahan kemiskinan tertinggi tadi. Artinya bahwa, sekalipun dengan kasat mata banyak kita lihat banyak masyarakat miskin di provinsi DKI Jakarta, namun secara pendapatan dan pemenuhan 2100 kalori serta garis kemiskinan non makanan penduduk DKI Jakarta dapat dikatakan telah memenuhinya dengan baik, tercermin dari nilai keparahan kemiskinan yang mendekati 0.



Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2011

1.3 Persentase Penduduk yang Menamatkan Pendidikan Tinggi (SMA ke atas)

Ukuran ini menunjukkan perbandingan antara seberapa besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikannya pada jenjang SMA atau lebih yang berkategori penduduk miskin dengan seluruh penduduk yang dikategorikan miskin di tiap provinsi yang ada di Indonesia.

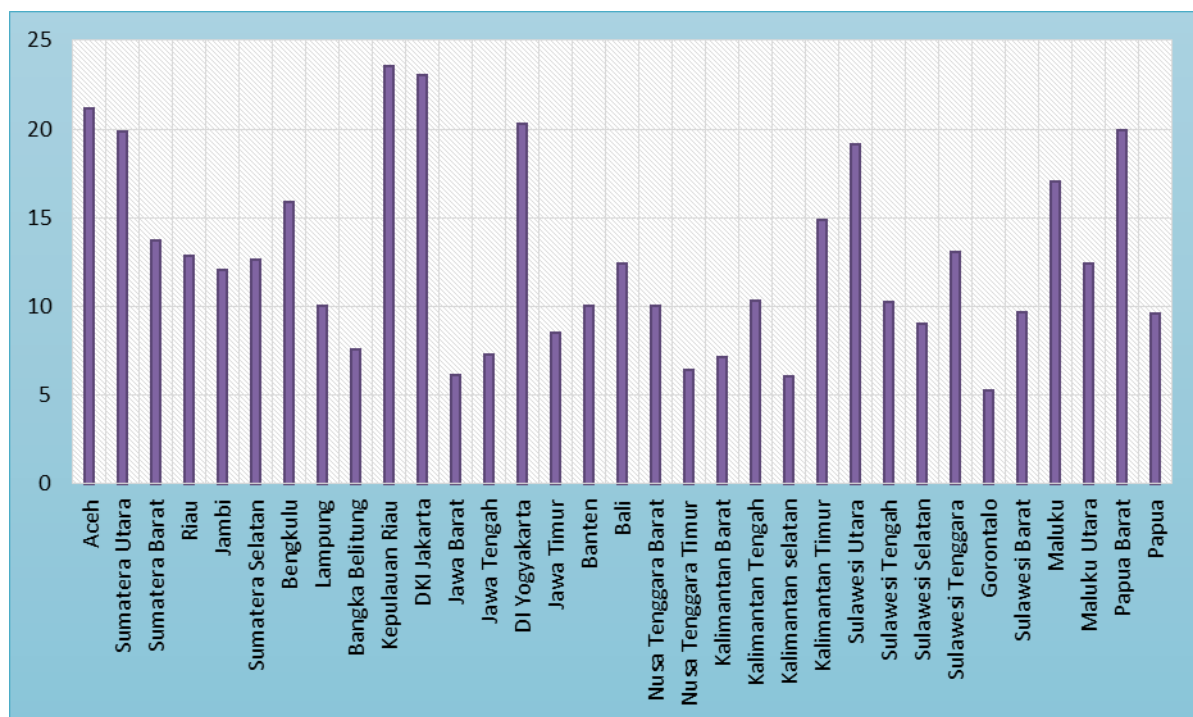
Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa provinsi dengan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (SMA ke atas) yang paling tinggi adalah provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta yang angkanya mencapai lebih dari 22%. Artinya bahwa dari sekian besar penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas, ada lebih dari 22% penduduk yang menamatkan pendidikannya sampai pada jenjang SMA bahkan lebih dari itu.

Provinsi dengan persentase tertinggi berikutnya adalah provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada fenomena yang cukup menarik, bahwa berbeda dengan hasil sebelumnya, Provinsi Papua Barat justru termasuk

ke dalam 5 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin yang berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikannya pada jenjang SMA ke atas. Ini menandakan bahwa sekalipun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang cukup besar di provinsi ini, tidak menghalangi penduduknya untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk miskin yang berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikannya pada jenjang SMA ke atas yang terendah adalah provinsi Gorontalo. Provinsi ini tergolong provinsi baru, sehingga kemungkinan besar sarana dan prasarana untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi masih terbatas.

II. Analisis Cluster

Dari hasil *running* data dengan menggunakan software SPSS 20 for Windows maka penulis menyimpulkan daerah-daerah prioritas untuk peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi yang terdapat pada Tabel 1.



Gambar 3. Persentase Penduduk yang Menamatkan Pendidikan Tinggi (SMA ke Atas)

Hasil ini adalah hasil perpaduan antara 4 metode analisis *cluster* yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis mengambil perpaduan antara hasil isrisan juga sekaligus gabungan dari keempat metode tersebut dengan juga memperhatikan data aktual yang ada.

Daerah Prioritas 1 adalah provinsi-provinsi dengan kategori prioritas sangat perlu untuk segera mendapatkan bantuan serta kebijakan mengenai peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi bagi

rakyat miskin. Kemudian selanjutnya disusul oleh daerah prioritas 2, prioritas 3 dan penyelarasan bagi daerah prioritas 4. Daerah prioritas 1 adalah daerah yang sebelumnya dikenali dengan Indeks keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan terendah serta yang memiliki penduduk miskin yang berusia 15 tahun yang menamatkan pendidikannya pada jenjang SMS ke atas dengan persentase terendah. Kemudian disusul daerah prioritas 2 dan selanjutnya priotitas 3 dan 4.

Tabel 1. Kategori Daerah Prioritas untuk Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan Tinggi Bagi Rakyat Miskin di Indonesia Tahun 2011

Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4
Papua	lampung	Sumatera Barat	Kepulauan Riau
Papua Barat	Sulawesi tengah	Kalimantan Timur	DKI Jakarta
Maluku	Jawa Timur	Bengkulu	Aceh
	Sulawesi selatan	Jambi	DI Yogyakarta
	Banten	Bali	Sumatera Utara
	NTB	Riau	Sulawesi Utara
	Sulawesi barat	Sumatera Selatan	
	Kalimantan tengah	Maluku Utara	
	NTT	Sulawesi Tenggara	
	Gorontalo		
	Jawa barat		
	Kalimantan Selatan		
	Bangka Belitung		
	Kalimantan Barat		
	Jawa Tengah		

Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Daerah dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- Dari hasil yang diperoleh daerah dengan tingkat prioritas 1 atau sangat perlu untuk menerima bantuan serta kebijakan terkait sistem pendidikan nasional dalam hal ini adalah peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi adalah provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku, disusul oleh provinsi daerah prioritas 2 yaitu provinsi Lampung, NTT, NTB dan 12 provinsi lainnya. Sementara itu daerah prioritas 3 dan 4 hanya perlu sedikit ditambah persentasenya mengingat kebutuhan urgensi terkait dengan persediaan APBN yang ada.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran bagi pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Pemerintah perlu untuk segera membuat kebijakan terkait dengan kondisi kemiskinan yang ada pada provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. Jika selama ini selalu digembargemborkan jangan hanya memberi ikan, dan berilah pancing, maka perlu dipikirkan pancing seperti apa yang tepat dan bagaimana tindakan nyatanya.

- Pemerintah perlu untuk segera merencanakan dan membuat kebijakan terkait mengenai peningkatan Sistem pendidikan nasional utamanya bagi kaum miskin, dan itu berfokus pada penyediaan sarana dan pra sarana sekolah maupun fasilitas lain, serta pengadaan tenaga pengajar bagi masyarakat yang ada pada daerah prioritas 1 dan 2 yang dihasilkan oleh penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2007. *Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, Maret 2007*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2011. *Data dan Informasi Kemiskinan Menurut Provinsi, 2011*. Jakarta: BPS.
- Hudaya, Dadan. 2009. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi: Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pravitasari, Dinny. 2012. *Kemiskinan di Wilayah Timur Indonesia*. Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jakarta.
- Anonim. 2003. *Handout Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan*

Presiden RI (2008) *Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas*. Jakarta.

<http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2013.

Keterangan Penulis

Didiq Rosali Ali merupakan mahasiswa jurusan Statistika Ekonomi di Sekolah Ilmu Tinggi Statistik. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Palopo Sulawesi. Paper berjudul “Daerah Prioritas Untuk Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Rakyat Miskin di Indonesia” mengantarkan Penulis meraih peringkat kedua pada lomba Call For Paper yang diadakan oleh Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa. Sebelumnya, Penulis pernah melakukan penelitian tentang (1) Pendeteksian Pencilan Pada Data dan (2) Hubungan Simultan Kurs Dengan Harga Minyak.